Sistim Tebasan, Bibit Unggul dan Pembaharuan Desa di Jawa*

Oleh William L. Collier,

Soentoro,

Gunawan Wiradi,

Makali

Selama dua tahun belakangan ini, suatu perkembangan yang agak eksplosif telah berlangsung pada beberapa daerah pedesaan di Jawa. Suatu cara petani yang termasuk agak lama dalam hal menjual hasil tanamannya menjelang musim panen belakangan ini telah dipraktekkan beberapa desa untuk membatasi jumlah penuai padi, mengurangi bagian hasil panen yang secara tradisionil biasa mereka terima, serta menurunkan biaya panenan. Cara atau metode yang disebut *"tebasan"* itu, juga memungkinkan digunakannya sabit (arit) untuk memotong padi dari jenis bibit unggul serta membayar para penggarap bukan dalam bentuk natura, tapi dengan uang tunai. Perubahan-perubahan sistim bertani yang baru ini telah memungkinkan para petani dan pedagang-perantara (penebas) untuk memperoleh keuntungan bersih yang lebih besar dari hasil panen, sedangkan mayoritas dari buruh tani penuai padi menerima bagian yang lebih kecil, bahkan banyak yang sama sekali tidak bisa ikut serta atau ikut menikmati panen tersebut. Petani pemilik sawah ternyata telah berusaha menghilangkan peranannya yang tradisionil sebagai "Bapak dan majikan" yang biasa memberi pekerjaan kepada petani penggarap yang tak punya tanah. Hubungan petani/pemilik dan petani penggarap dalam pola "ikatan patron-klien" yang tradisionil telah bergeser digantikan oleh peranan penebas yang membeli hasil panen petani-pemilik tanah, hingga sangat menguntungkan segelintir pedagang atas kerugian mayoritas dari penghuni desa.

Arti Tebasan dan Lokasinya

Sekalipun cara tebasan telah agak luas dikenal dan dilaporkan terdapat di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, namun hanya pada empat desa dari 20 desa sampel yang kami survey ada kami temukan sistim tebasan yang dipakai oleh petani dan pedagang padi[1]. Lokasi dari desa sampel dan daerah tebasan tersebut adalah pada dua desa di Kabupaten Kendal dan dua desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para petani sampel pada 16 desa yang lain tidak menjual padinya dengan cara tersebut di atas. Kadang-kadang hasil panen di luar padi dijual juga dengan cara tebasan di beberapa desa.

* Karangan ini dalam bentuknya yang diperluas berjudul "Agricultural Technology and Institutional Change in Java", dalam *Food Research Institute Studies in Agricultural Development, Trade, and Development*, Stanford University Press, November 1974.

1 Beberapa daerah di mana pernah dilaporkan adanya sistim tebasan ialah di Kabupaten Karawang (oleh Dr. Herman Soewardi, Universitas Pajajaran), Daerah Istimewa Yogyakarta (oleh Dr. Mubyarto, Universitas Gajah Mada), Kabupaten Jepara (oleh John Hadaway, Universitas Satya Wacana), Kabupaten Klaten (Widya Utami dan John Hadaway), Kabupaten Kendal dan Pemalang (oleh William L. Collier, Gunawan Wiradi dan Soentoro, Survey Agro Ekonomi).

Tebasan berarti bahwa petani-pemilik menjual hasil tanamannya yang hampir masak di sawah kepada seorang *penebas* (pedagang perantara) sekitar seminggu *sebelum* panen. Penebas itulah kemudian yang menggarap panenan dan menjual padinya kepada fihak ke tiga. Apabila ia berasal dari desa petani itu sendiri, penebas tersebut biasanya membayar kepada petani-pemilik sesudah hasil panennya terjual. Petani-pemilik itu umumnya menunggu sampai seminggu atau 10 hari untuk dapat menerima uang hasil sawahnya. Jika penebas berasal dari desa lain dan kurang dikenal oleh petani setempat, maka ia akan membayar kepada petani pada waktu panen.

Di Jawa secara tradisionil panen padi di sawah dilakukan oleh pemotong padi yang tak terbatas jumlahnya, baik dari desa itu sendiri maupun yang datang dari daerah sekitarnya, menggunakan alat pisau kecil penuai padi yang disebut ani-ani dan mereka biasanya menerima sejumlah bagian tertentu dari hasil panen itu dalam bentuk natura sebagai imbalan kerjanya. Franke menyebut bahwa "Benar-benar ribuan keluarga tani yang tak punya tanah berbondong-bondong menjelajahi daerah pedesaan di jawa, mengikuti musim dan tempat panen dari Timur ke Barat, dan kemudian kembali lagi pada musim berikutnya ketika padi di sawah mulai menguning lagi"[2]. Di lain fihak, penebas bisa membatasi bahkan memilih tani penggarap panennya, menyuruh mereka menggunakan alat sabit, mengurangi jumlah bagian hasil panen yang biasanya diterima, menimbang setiap ikat padi yang dipotong penggarap dan membayar mereka dengan uang tunai. Jika petani-pemilik tidak menjual tanaman garapannya kepada penebas, sudah tentu ia tidak bisa menurunkan biaya-biaya tersebut. Jika masa panen tiba, banyak sekali terjadi ketegangan antara buruh tani yang memotong padi dengan pemilik sawah, karena para pemotong padi selalu berusaha meningkatkan jumlah bagian hasil panennya sedangkan pemilik berusaha menekannya. Para petani pemilik secara tradisionil mempunyai kewajiban sosial terhadap para tani penggarap tersebut, yang dengan demikian tidak memungkinkan pemilik sawah melakukan kontrol yang efektif terhadap hasil panennya dan tak bisa membatasi jumlah kerugian yang dideritanya. Sebaliknya, para penebas lebih dianggap sebagai pedagang-perantara yang tidak terikat oleh kewajiban-kewajiban tradisionil yang berlaku di kalangan masyarakat desa setempat. Seperti diungkapkan oleh Utami dan Thalauw, "Masalah paling gawat yang ditimbulkan oleh sistim tebasan ialah bahwa sistim itu cenderung membebaskan para petani desa dari berbagai ikatan sosio-ekonomi mereka, bahkan juga membatasi kesempatan kerja bagi para buruh tani penggarap"[3].

Tebasan dan Jenis Bibit Padi Unggul

Menurut keterangan para penebas yang diwawancarai, beberapa jenis padi selalu mereka beli dengan cara tebasan pada empat desa sampel yang disurvey[4]. Sekalipun demikian, cara tebasan menjadi penting hanya sejak dikenalnya jenis padi dari bibit unggul. Berdasarkan keterangan 120 petani sampel di empat desa tersebut, tebasan terutama muncul hanya sejak musim hujan tahun 1970/1971 di Kabupaten Kendal dan sejak musim kering 1970 di Kabupaten Pemalang *(Tabel 1)*.

2 Richard William Franke, "The Green Revolution in a Javanese Village", thesis Ph.D. (tidak diterbitkan). Harvard University, 1972, hal. 181.

3 Widya Utami dan John Thalauw, *"Changes in Rice Farming in Selected Areas of Asia — A Study Conducted in Klaten Regency, Central Java, Dry Season 1971 and Rainy Season 1971/1972,* Lembaga Penelitian Ilmu Sosial, Universitas Satya Wacana, 1972, hal. 63.

4 Team peneliti lapangan dari Survey Agro Ekonomi (SAE) pertama kali menaruh perhatian terhadap tebasan ketika mewawancarai 120 petani sampel untuk keenam kalinya selama jangka waktu 5 tahun, yaitu pada dua desa di Kabupaten Kendal dan dua desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Desember 1972 dan Januari 1973. Ketika itu penulis mewawancarai sejumlah penebas di pedesaan tersebut.

TABEL 1 Persentase petani sampel di Kabupaten Kendal dan Pemalang yang menjual panen padinya kepada penebas pada tiap musim ketika mereka diinterview*.

	Kabupaten Kendal		*Kabupaten Pemalang*	
	Desa No. 1 %	*Desa No. 2* %	*Desa No. 3* %	*Desa No. 4* %
1. Musim hujan 1968/1969 (Ronde I)	0,0	0.0	0,0	0,0
2. Musim kering 1969 (Ronde II)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Musim hujan 1969/1970 (Ronde III)	0,0	0,0	0,0	11,1
4. Musim kering 1970 (Ronde IV)	7,1	0,0	20,0	6,9
5. Musim hujan 1970/1971 (Ronde V)	37,0	6,7	17,2	0,0
6. Musim kering 1972 (Ronde VI)	26,9	3,7	37,9	75,9
7. Musim hujan 1972/1973 (Ronde VII)a	37,5	42,8	b	b

a Persentase pada Ronde VII ini diperoleh dari para petani yang telah melakukan panen. Pada waktu wawancara kami lakukan, beberapa diantaranya belum sampai pada tahap dihubungi penebas. Jika semua petani sampel dipakai, maka persentasenya menjadi 30,0% untuk Desa No. 1 dan 28,6% untuk Desa No. 2 pada musim hujan 1972/1973. Hanya di Kabupaten Kendal para petaninya sempat diwawancarai sampai ke tujuh kalinya.

b Para petani di Pemalang tidak diinterview sesudah musim hujan 1972/1973.

* Data dari wawancara SAE terhadap 30 petani sampel pada tiap desa sampel di Jawa.

Hanya sejak tahun 1972 tebasan telah diterapkan oleh sebagian terbesar petani desa tersebut. Jelas bahwa hal ini merupakan perkembangan yang baru di desa yang besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan petani, pedagang-perantara, buruh tani dan mungkin juga terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Kendati begitu, sukar sekali membuktikan pengaruh penggunaan bibit unggul dalam perubahan ini, karena penggunaan yang meluas dari bibit unggul tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan dengan munculnya sistim tebasan *(Tabel 2)*.

Pada saat penjualan padi pada para penebas meningkat dengan pesatnya, mayoritas terbesar dari petani sampel tersebut mulai menanam padi dengan jenis bibit unggul *(Tabel 3)*.

Dari petani sampel di Desa No. 1 pada musim hujan 1972/1973 yang menjual hasil sawahnya kepada penebas, 67% dari padanya telah menanam padi bibit unggul. Dari petani sampel di Desa No. 2 pada musim kering 1972 yang menjual kepada penebas, semuanya menanam padi bibit unggul. Dari petani sampel di Desa No. 4 yang menjual hasilnya kepada penebas, 64% menanam padi bibit unggul. Hanya di Desa No. 3 petani sampel yang menanam padi bibit unggul persentasenya rendah, yaitu hanya 27%. Meskipun hal ini bukan merupakan bukti yang nyata, namun kecenderungannya jelas menunjukkan bahwa jenis bibit unggul telah mendorong penjualan tanaman padi kepada penebas beberapa hari sebelum panen. Dengan memperhatikan hasil wawancara dengan para petani sampel yang menjual tanamannya kepada penebas, bisa diketahui bahwa besarnya ukuran sawah yang digarap bukan merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Petani sampel telah dikategorisasikan sedemikian rupa hingga sebagian mewakili para petani-pemilik sawah yang terbesar dan sebagian lagi mewakili semua lapisan petani yang lain. Keterangan yang kami peroleh dari para petani sampel itu pada musim panen yang terakhir, menunjukkan bahwa 20% dari petani sampel terbesar dan 32% dari petani sampel lainnya di Desa No. 1 telah menjual hasil tanamannya kepada penebas. Di Desa No. 2 persentase ini menunjukkan 60% petani besar dan 22% petani lainnya. Di Desa No. 3 40% besar dan 38% lainnya, sedang di Desa No. 4

TABEL 1 Persentase petani sampel di Kabupaten Kendal dan Pemalang yang menjual panen padinya kepada penebas pada tiap musim ketika mereka diinterview*.

	Kabupaten Kendal		*Kabupaten Pemalang*	
	Desa No. 1 %	*Desa No. 2* %	*Desa No. 3* %	*Desa No. 4* %
1. Musim hujan 1968/1969 (Ronde I)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Musim kering 1969 (Ronde II)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Musim hujan 1969/1970 (Ronde III)	0,0	0,0	0,0	11,1
4. Musim kering 1970 (Ronde IV)	7,1	0,0	20,0	6,9
5. Musim hujan 1970/1971 (Ronde V)	37,0	6,7	17,2	0,0
6. Musim kering 1972 (Ronde VI)	26,9	8,7	37,9	75,9
7. Musim hujan 1972/1973 (Ronde VII)a	37,5	42,8	b	b

a Persentase pada Ronde VII ini diperoleh dari para petani yang telah melakukan panen. Pada waktu wawancara kami lakukan, beberapa diantaranya belum sampai pada tahap dihubungi penebas. Jika semua petani sampel dipakai, maka persentasenya menjadi 80,0% untuk Desa No. 1 dan 28,6% untuk Desa No. 2 pada musim hujan 1972/1973. Hanya di Kabupaten Kendal para petaninya sempat diwawancarai sampai ke tujuh kalinya.

b Para petani di Pemalang tidak diinterview sesudah musim hujan 1972/1973.

* Data dari wawancara SAE terhadap 50 petani sampel pada tiap desa sampel di Jawa.

Hanya sejak tahun 1972 tebasan telah diterapkan oleh sebagian terbesar petani desa tersebut. Jelas bahwa hal ini merupakan perkembangan yang baru di desa yang besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan petani, pedagang-perantara, buruh tani dan mungkin juga terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Kendati begitu, sukar sekali membuktikan pengaruh penggunaan bibit unggul dalam perubahan ini, karena penggunaan yang meluas dari bibit unggul tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan dengan munculnya sistim tebasan *(Tabel 2)*.

Pada saat penjualan padi pada para penebas meningkat dengan pesatnya, mayoritas terbesar dari petani sampel tersebut mulai menanam padi dengan jenis bibit unggul *(Tabel 3)*.

Dari petani sampel di Desa No. 1 pada musim hujan 1972/1973 yang menjual hasil sawahnya kepada penebas, 67% dari padanya telah menanam padi bibit unggul. Dari petani sampel di Desa No. 2 pada musim kering 1972 yang menjual kepada penebas, semuanya menanam padi bibit unggul. Dari petani sampel di Desa No. 4 yang menjual hasilnya kepada penebas, 64% menanam padi bibit unggul. Hanya di Desa No. 3 petani sampel yang menanam padi bibit unggul persentasenya rendah, yaitu hanya 27%. Meskipun hal ini bukan merupakan bukti yang nyata, namun kecenderungannya jelas menunjukkan bahwa jenis bibit unggul telah mendorong penjualan tanaman padi kepada penebas beberapa hari sebelum panen. Dengan memperhatikan hasil wawancara dengan para petani sampel yang menjual tanamannya kepada penebas, bisa diketahui bahwa besarnya ukuran sawah yang digarap bukan merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Petani sampel telah dikategorisasikan sedemikian rupa hingga sebagian mewakili para petani-pemilik sawah yang terbesar dan sebagian lagi mewakili semua lapisan petani yang lain. Keterangan yang kami peroleh dari para petani sampel itu pada musim panen yang terakhir, menunjukkan bahwa 20% dari petani sampel terbesar dan 32% dari petani sampel lainnya di Desa No. 1 telah menjual hasil tanamannya kepada penebas. Di Desa No. 2 persentase ini menunjukkan 60% petani besar dan 22% petani lainnya. Di Desa No. 3 40% besar dan 38% lainnya, sedang di Desa No. 4

TABEL 2 Persentase petani sampel di Kabupaten Kendal dan Pemalang yang menanam jenis padi bibit unggul[a] [dari musim hujan 1968/1969 hingga musim hujan 1972/1973*

Musim	Kendal		Pemalang	
	Desa No. 1 %	Desa No. 2 %	Desa No. 3 %	Desa No. 4 %
1. Musim hujan 1968/1969	0.0	0,0	0,0	0,0
2. Musim kering 1969	10,3	0,0	0,0	28,3
3. Musim hujan 1969/1970	0,0	0,0	0,0	10,3
4. Musim kering 1970	3,6	0,0	0,0	13,8
5. Musim hujan 1970/1971	11,1	0,0	3,3	40,0[b]
6. Musim kering 1971	10,7	0,0	6,7	43,3
7. Musim hujan 1971/1972	13,3	3,7[c]	14,3[d]	66,7
8. Musim kering 1972	26,9	7,4	10,7	67,0[e]
9. Musim hujan 1972/1973	40,0[f]	62,1[g]	h	h

a Bibit unggul di sini termasuk jenis padi IR, C4 dan Pelita.
b Angka 40% ini terdiri dari 33,3% yang menanam jenis bibit IR dan 6,7% bibit C4.
c Angka 3,7% ini dari seorang petani yang menanam jenis padi C4.
d Angka 14,3% ini dari 10,7% yang menanam IR dan 3,6% Pelita.
e Angka 67,0% ini terdiri dari 63,3% yang menanam IR dan 3,7% Pelita.
f Angka 40,0% ini dari 30,0% IR, 6,7% C4 dan 3,3% Pelita.
g Angka 62,1% dan 6,9% IR dan 55,2% C4
h Tak ada informasi mengenai jenis padi yang ditanam pada musim hujan 1972/1973 di Pemalang.
* Data dari tujuh kali (ronde) wawancara SAE terhadap 30 petani sampel pada desa-desa sampel di Jawa

TABEL 3 Persentase mereka yang menanam padi bibit unggul (IR, C4, Pelita) dari petani sampel yang menjual kepada penebas, menurut musim*.

	Kendal		Pemalang	
	Desa No. 1 %	Desa No. 2 %	Desa No. 3 %	Desa No. 4 %
Musim Hujan 1969/1970 (III)	a	a	a	0,
Musim Kering 1970 (IV)	100	a	0	100
Musim Hujan 1970/1971 (V)	20	0	38	a
Musim Kering 1972 (VI)	33	100	27	64
Musim Hujan 1972/1973 (VII)	67	100	–	–

a Tidak satupun petani sampel menjual kepada penebas.
* Data berdasarkan keterangan dari 30 petani sampel yang diinterview pada setiap desa sampel.

80% besar dan 75% kelompok petani lainnya. Kecuali untuk Desa No. 2, persentase ini tidak menunjukkan bahwa besarnya ukuran sawah garapan telah membuat perbedaan dalam keputusan petani untuk menjual kepada penebas.

Survey Dengan Sistim Wawancara

Untuk mempelajari pengaruh sistim tebasan terhadap masyarakat pedesaan – setelah memperhatikan beberapa indikasi pengaruhnya dalam enam kali proses wawancara pada desa sampel di Kabupaten Kendal dan Pemalang – Survey Agro Ekonomi (SAE) kemudian menyelenggarakan suatu survey khusus dengan sistim wawancara pada bulan Maret 1973, yang secara khusus pula menyelidiki gejala-gejala tersebut. Kali ini para penebas, petani-pemilik sawah, petani-penggarap, dan sejumlah besar lurah dan pemuka desa telah diwawancarai dengan intensif di kedua desa Kabupaten Kendal *(Tabel 4)*. Dengan demikian diperoleh cukup banyak informasi untuk melihat pengaruh tebasan terhadap kesempatan kerja, pendapatan buruh tani, penghasilan petani pemilik, biaya panenan, penggunaan alat

TABEL 4 Besarnya sampel dan jumlah populasi pada dua desa di Kabupaten Kendal, April 1973.

	Jumlah Sampel	*Jumlah Populasi*
I. Kelompok pembeli tebasan		
a. Desa No. 1	6	a
b. Desa No. 2	8	a
II. Petani		
a. Desa No. 1		
1. Besar	5	10
2. Representatif	25	226
b. Desa No. 2		
1. Besar	5	10
2. Representatif	25	270
III. Penuai padi/buruh panenan		
a. Desa No. 1	41	b
b. Desa No. 2	80	b
IV. Lurah (pimpinan desa)		
a. Kecamatan Kendal	18	20
b. Kecamatan Weleri	15	32

a Jumlah populasinya tak mungkin ditetapkan. Meskipun begitu sebagian besar pembeli tebasan yang tinggal di desa-desa tersebut telah diinterview. Masalahnya adalah tidak mudah untuk menemukan penebas yang datang dari luar desa-desa tersebut.

b Jumlah populasinya juga tak mungkin ditentukan tanpa melakukan suatu sensus yang sempurna, yang biarpun begitu juga belum termasuk mereka yang datang dari luar desa tersebut.

sabit, pembayaran pada penggarap dengan uang tunai, hubungan patron-klien dan sebagainya.

Bawon dan Pola Ikatan Patron-Klien: Cara Tradisionil.

Panen padi di Jawa dengan cara tradisionil, yaitu dengan menggunakan ani-ani, memang memungkinkan siapa saja yang mau untuk ikut serta panenan, agar memperoleh suatu bagian dari hasil panen yang disebut *"bawon"*[5]. Ini merupakan suatu metode panenan yang menunjukkan sumbangsih petani terhadap kesejahteraan masyarakatnya serta adanya pola hubungan patron-klien *(the patron-client relationship)* antara petani pemilik sawah dengan buruh tani yang tak punya tanah. Padi hasil desa secara tradisionil dianggap selayaknya bisa dinikmati oleh semua penghuni desa. Van der Kolff dalam tulisannya pada tahun 1920-an dan 1930-an mengatakan bahwa penggunaan ani-ani – pisau tangan kecil untuk memotong batang padi satu demi satu – telah dilakukan sejak berabad-abad lamanya. Alasannya, menurut Van der Kolff, cara itu menunjukkan suatu penghormatan yang layak terhadap dewa padi (Dewi Sri – red.) dan juga dimaksudkan agar masyarakat tani yang miskin juga dapat memperoleh manfaat dari panenan padi[6]. Sistim ini bisa berjalan dalam suatu masyarakat yang setengah tertutup yang belum dibanjiri oleh petani penganggur ataupun setengah menganggur baik yang berasal dari desa petani itu sendiri maupun pendatang dari desa lain. Pola kesetiaan komunal dan saling tolong-menolong (gotong-royong – red.) yang berakar pada tradisi desa di Jawa dengan tata susunan sosial-ekonominya yang tertutup itu telah mengatur segala aspek produksi dan pemasaran padi hasil panen[7]. Tradisi cara bawon ini – di mana dulunya merupakan suatu mekanisme yang ideal untuk

5 Robert R.Jay, *Javanese Villagers*, MIT Press, 1969, hal. 255.

6 G.H. van der Kolff, *The Historical Development of the Labor Relationships in a Remote Corner of Java as They Apply to the Cultivation of Rice*, the Institute of Pacific Relations, 1936, hal. 12.

7 Justus M. Van der Kroef, "Land Tenure and Social Structure in Rural Java", *Rural Sociology*, Desember 1960, hal. 415.

menunjang semua yang berada di desa – setelah bertahun-tahun kemudian berubah menjadi suatu cara yang dipakai buruh tani untuk mengeksploitir para pemilik sawah. Pada zaman yang lampau tidak banyak tenaga kerja tani pada waktu musim panen, hingga hal ini mendorong para petani pemilik sawah untuk menawarkan bawon (bagian hasil panen) yang cukup besar kepada buruh tani yang mau menggarap sawahnya. Ketika jumlah penduduk makin meningkat, kelangkaan tenaga kerja pada musim panen makin menurun, namun tradisi tetap saja tak berubah. Bahkan sampai waktu belakangan ini, buruh tani penggarap panen masih menuntut haknya yang tradisionil dan tetap menuntut jumlah bawon yang sama, sekalipun mereka bekerja dalam keadaan yang sudah sangat berubah. Perlawanan terhadap penggunaan sabit (arit) sebagai suatu inovasi cara baru untuk memotong padi secara lebih efisien bahkan telah terjadi sejak tahun 1926, yang berakar dalam kekhawatiran para buruh tani terhadap setiap perubahan yang bisa menghancurkan sistim bawon[8].

Sejak dini hari sejumlah wanita dan gadis remaja yang bukan main banyaknya akan berkumpul sepanjang tebing-tebing sawah yang mereka anggap akan melakukan panen. Ketika pemilik sawah itu muncul, mereka segera menyerbu turun ke sawah, mengambil tempat-tempat yang strategis, dan dengan ani-ani di tangan segera memotong dan mengikat padi sebanyak mungkin. Seluruh sawah seluas satu hektar dengan mudah dapat diselesaikan dalam tempo satu jam, karena bisa digarap sampai sejumlah 500 orang yang ikut serta panen sawah tersebut. Sekali padi di sawah telah dipotong, serbuan itu menurun karena mereka sudah tidak berlomba lagi dengan tetangganya. Tiap wanita kemudian akan membawa ikatan padi yang telah dipotongnya ke rumah pemilik sawah, di mana isteri pemilik itu akan membagi ikatan-ikatan padi – sesuai dengan cara bawon yang berlaku setempat – menjadi dua bagian, yaitu satu bagian untuk si penggarap dan satu bagian lagi buat si pemilik. Pada setiap langkah dalam proses panenan itu selalu ada saja usaha fihak buruh penggarap – terutama bila berasal dari luar desa petani yang bersangkutan – untuk meningkatkan bagian hasil yang bisa diperolehnya.

Hubungan patron-klien terlihat pada peranan sang petani dalam menyediakan suatu bagian dari hasil panennya kepada penduduk desa. Biasanya, ia akan harus memberitahu lebih dulu kepada keluarga dekat dan tetangganya, kapan ia akan melakukan panen dan menjanjikan bawon yang lebih besar. Dalam keadaan yang stabil tanpa adanya perubahan-perubahan yang berarti, hubungan yang demikian itu pada dirinya akan menimbulkan suatu kekuatan atau beban moril[9]. Tetapi keadaan di pedesaan pulau Jawa tidak bisa dianggap stabil. Mulai tahun 1950-an, keadaan status-quo – juga di daerah-daerah di mana tradisi adat dan harmoni masih menonjol – dalam banyak hal telah terganggu[10]. Berbagai tekanan, apakah baik atau buruk, dari dalam atau dari luar, makin banyak dirasakan oleh para petani, buruh tani, pedagang dan pimpinan desa. Para petani sementara itu menyadari bahwa pola ikatan patron-klien seperti itu merupakan beban yang terlalu berat, hingga mereka mencari berbagai cara untuk mengurangi beban tersebut[11].

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, jumlah buruh tani juga meningkat. Akan tetapi peningkatan jumlah penduduk tersebut dan tradisi masyarakat desa untuk mencukupi semua kebutuhan warganya, ternyata tidak mungkin bisa ditampung oleh perekonomian desa yang punya sumber terbatas[12]. Tanggung jawab sosial para tani makin

8 J. Van Gelderen, "The Economics of the Tropical Economy", dalam *Indonesian Economics – The Concept of Dualism in Theory and Practice*, W. van Hoeve Publishers Ltd., the Hague, 1966, hal. 138.

9 James C. Scott, "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change, in Rural Southeast Asia", *The Journal of Asian Studies*, November, 1972 hal. 11.

10 Gerrit Huizer, *Peasant Mobilization and Land Reform in Indonesia*, Institute of Social Studies Occasional Papers, the Hague, Netherlands, 1972, hal. 8.

11 Widya Utami, "Tebasan, suatu Gejala Sosial Ekonomis", *Typhrawita*, LPIS, Universitas Satya Wacana, Salatiga, Maret/April 1972, hal. 26.

12 Juwus M. Van der Kroef, *op. cit.*, hal. 419.

besar, karena jumlah buruh tani yang tak punya tanah makin meningkat terus. Sementara itu, diperkenalkannya teknologi padi yang baru, merangsang petani untuk berfikir secara lebih komersiil. Akibatnya, prinsip saling menolong dalam pola hubungan patron-klien mulai dirasakan sebagai beban berat yang ingin dielakkan oleh para petani. Keinginan untuk memperbaiki kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat ini ternyata secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai tradisionil masyarakat desa. Di masa lampau, mereka yang lebih berada akan memikul kewajiban moril untuk mendistribusikan kekayaannya, dengan memberi pinjaman yang tak akan dibayar kembali, dengan membiayai perayaan desa, menyumbang kegiatan kemasyarakatan, dan sebagainya[13]. Meskipun banyak tekanan di beberapa desa untuk melanjutkan ikatan patron-klien antara petani-pemilik sawah sebagai "Bapak" yang harus membagi hasil dengan buruh tani yang tak punya tanah, namun hubungan semacam itu makin lama makin sulit dipertahankan.

Salah satu jalan bagi petani untuk membebaskan dirinya dari sistim bawon ialah dengan cara menjual tanamannya kepada penebas, pedagang yang membeli padi. Para penebas ini lebih mampu membatasi jumlah buruh tani sebab masyarakat desa menganggap penebas itu bertindak sebagai pedagang yang sudah selayaknya bila bersikap komersiil dan lugas. Tanda-tanda dari sikap komersiil penebas yang diterima oleh masyarakat desa ialah dengan digantinya sistim pemberian upah dalam bentuk padi dengan upah dalam bentuk uang. Dipakainya alat timbangan untuk mengukur secara tepat jumlah padi yang dikerjakan buruh tani, juga bukti diterimanya sikap lugas para penebas tersebut.

Sebaliknya, makin meluasnya sistim tebasan dan penggunaan sabit, sangat mengecewakan para buruh panenan. Digunakannya sabit jelas mempersempit kesempatan kerja bagi buruh wanita dan buruh yang lebih tua, karena pekerjaannya lebih berat daripada memakai ani-ani. Di samping itu, meluasnya daerah sawah yang ditebas juga berarti makin kecilnya kesempatan kerja dan penghasilan buat semua penuai padi. Di Desa No.1 pernah terjadi para buruh tani panenan menyerang penebas, karena mereka dilarang ikut serta dalam sawah yang sedang panen. Dalam sebuah artikel tentang perubahan sosial di Jawa sekitar tahun 1900 dan 1930, Wertheim mengemukakan bahwa seorang pemilik sawah yang mengganti ani-ani dengan sabit untuk mengurangi jumlah buruh tani yang ikut serta panen, akan berarti mengucilkan dirinya sendiri dari masyarakat desa. Dikatakannya pula bahwa sistim masyarakat desa adalah suatu sistim pengangguran yang tak kentara, dan bahwa sistim nilai masyarakat desa pada hakekatnya menolak inovasi dan perbaikan teknik, karena hal itu akan membawa kemelaratan dan kesengsaraan bagi sebagian besar penduduk desa[14].

Dahulu, metode yang dipakai untuk memotong padi di sawah terbagi dalam dua tahap. Pertama, ialah kelompok pemotong padi dengan ani-ani, yang di Jawa Tengah disebut "penderep". Setelah pemotongan padi selesai, biasanya masih ada sisa-sisa padi di sawah, karena ada batang padi yang terlalu pendek dan tak sampai terpotong oleh penderep. Juga semangat untuk memotong sebanyak mungkin mengakibatkan banyak sekali padi tak terpotong, kadang-kadang dengan sengaja. Dengan demikian kelompok penuai yang kedua akan turun untuk membersihkan sisa-sisa padi yang tertinggal. Memotong sisa-sisa padi yang tertinggal sesudah panen pertama itu disebut "ngasak", dan orang yang melakukannya disebut "pengasak". Bagian padi yang dipotong oleh kelompok kedua ini (pengasak) tidak dibagi dengan pemilik sawah, tetapi sepenuhnya merupakan bagian hasil panen yang dinikmati buruh panen. Panen ngasak tidak selalu dilakukan pada hari yang sama dengan panen utama, seringkali sehari sesudahnya.

13 James C. Scott and Ben Kerkvliet, "The Politics of Survival: The Peasant Response to Progress in Southeast Asia", *Journal of Southeast Asian Studies*, September, 1975, hal. 248.

14 W.F. Wertheim and The Siauw Giap, "Social Change in Java, 1900–1930", *Pacific Affairs*, Fall, 1962, hal. 228.

Dewasa ini dengan makin meningkatnya jumlah buruh tani dan berkurangnya kesempatan kerja, para penuai padi berduyun-duyun datang ke sawah tanpa diundang. Para penuai padi yang tak diundang itu langsung saja turun ke sawah dengan cara seenaknya. Di Desa No. 1 kelompok penderep dan kelompok pengasak turun ke sawah melakukan kerja pada waktu yang bersamaan, hingga tak bisa dibedakan mana kelompok penderep dan mana pengasak. Begitulah seringkali pengasak memotong padi yang bukan sekedar sisa-sisa. Kadang-kadang dengan sengaja beberapa bagian padi tidak dipotong oleh penderep, yang berarti dibiarkan untuk bisa dipotong oleh para pengasak yang masih ada hubungan keluarga dengan para penderep tersebut. Ketika mereka pergi menjinjing padi meninggalkan sawah, di antaranya akan berkata bahwa mereka adalah pengasak dan si pemilik tak mungkin bisa membuktikan sebaliknya. Masalah ngasak dan besarnya jumlah pemotong padi menimbulkan suasana ketegangan yang sering menggawat antara pemilik sawah dan buruh panenan[15]. Keadaan inilah di antaranya yang mendorong petani untuk menjual kepada penebas. Jika penebas menggunakan sabit untuk melakukan panen padi, maka tidak akan ada padi yang tersisa di sawah, hingga secara otomatis menghapuskan sistim ngasak atau tahap panen ke dua.

Untuk melukiskan meluasnya sifat dan penggunaan sistim tebasan ini dalam sampel yang lebih besar daripada dua desa tersebut di atas, maka pada dua kecamatan di mana kedua desa itu berada, telah dilakukan kunjungan survey terhadap lebih dari satu setengah jumlah desa lainnya guna memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai tebasan. Ternyata suatu rata-rata sebesar 28% dari petani pemilik sawah menjual sebagian atau seluruh tanaman padinya pada seorang penebas di Kecamatan No. 2 dan 53% menjualnya kepada seorang penebas di Kecamatan No. 1 *(Tabel 5)*. Persentase petani yang cukup besar ini jelas sekali menunjukkan betapa pentingnya arti tebasan di daerah tersebut. Perbandingan rata-rata jumlah padi di pedesaan tersebut yang dijual kepada penebas ialah 27% di Kecamatan No. 2 dan 44% di Kecamatan No. 1 *(Tabel 5)*. Masalah yang lebih serius lagi ialah bahwa sebagian terbesar dari para penebas bukan berasal dari desa di mana mereka membeli padi tebasan, sebagaimana terlihat dalam Tabel 6. Umumnya penebas itu menggunakan orang-orangnya sendiri yang didatangkan dari desa di mana ia berasal untuk melakukan panenan, yang berarti buruh tani yang tak punya tanah di desa-desa tersebut kehilangan kesempatan untuk memperoleh kerja dan hasil panen yang cukup besar di desanya sendiri. Tentu buruh tani itu bisa saja ikut serta dengan penebas yang berasal dari desanya yang telah membeli

TABEL 5 Persentase dari petani yang menjual panen padinya kepada penebas dan persentase jumlah padi desa yang dijual menurut Lurah desa pada dua kecamatan, musim hujan 1972/ 1973*

	Kecamatan No. 2 (%)	*Kecamatan No. 1 (%)*
Petani yang menjual kepada penebas	27,5	52,7
Panen padi desa yang dijual dengan tebasan	27,2	44,0

* Persentase ini adalah angka rata-rata, berdasarkan perkiraan yang dilakukan oleh para Lurah di 13 desa pada Kecamatan No. 2 dan 15 desa di Kecamatan No. 1 (lihat Tabel 8).

TABEL 6 Daerah asal penebas menurut lurah desa di kedua Kecamatan, musim hujan 1972/1973.

Daerah asal penebas	*Kecamatan No. 2 (%)*	*Kecamatan No. 1 (%)*
Dari desa yang bersangkutan	18,9	47,3
Dari luar desa	81,2	52,7

15 Ahli antropologi Anne Stoler White yang pernah tinggal di suatu desa di Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa dia pernah menyaksikan beberapa panen di desa di mana menurut pengamatannya keadaan tersebut disebabkan sangat banyaknya jumlah buruh panenan dan pengasak yang ikut serta pada setiap ada panen di desa, hingga menimbulkan kericuhan besar.

panen padi dari desa lain. Tetapi, untuk bisa ikut serta panen, mereka harus mempunyai hubungan patron-klien yang cukup kuat dengan si penebas tadi.

Menurut keterangan seorang anggota pimpinan Universitas Pajajaran, sistim tebasan juga dipraktekkan di Kabupaten Krawang, suatu daerah yang merupakan *supplier* beras utama untuk pasaran Jakarta. Menurut pengamatannya, akibat lain dari sistim tebasan ialah digalakkannya promosi terhadap bibit-bibit unggul berkwalitas tinggi yang dihasilkan oleh suatu kebun pembibitan di Sukamandi yang telah diresmikan oleh pemerintah. Para penebas bersedia membayar lebih untuk panen padi dari jenis bibit yang lebih baik, dan dengan demikian mereka juga mempromosikan penggunaan jenis bibit-bibit unggul tersebut. Di samping itu mereka juga menggunakan sabit untuk menggarap panen di daerah itu [16].

Kesempatan Kerja

Pengangguran *(unemployment)* dan kurangnya pekerjaan *(underemployment)* adalah dua persoalan paling serius yang sedang dihadapi oleh para perumus kebijaksanaan di Indonesia. Bersamaan dengan masalah itu ialah adanya jumlah penduduk yang sangat besar di daerah pedesaan yang sangat tergantung pada kerja tani. Dalam suatu penelitian yang telah mewawancarai lebih dari 3.300 penduduk desa yang tinggal di daerah-daerah penghasil beras utama di Jawa, dilaporkan bahwa kerja sebagai buruh tani merupakan sumber penghasilan yang utama bagi 10,5% penduduk desa-desa tersebut di Jawa Barat, 7,5% di Jawa Tengah dan 25,6% di Jawa Timur. Kerja buruh tani sebagai sumber pengbasilan penting kedua untuk 19,8% penduduk desa-desa di Jawa Barat, 27,1% di Jawa Tengah dan 10,9% di Jawa Timur [17]. Jelas sekali, bahwa lebih 30% dari penduduk pedesaan tersebut sangat tergantung sekali pada pekerjaan sebagai buruh tani. Dan mereka itulah yang kini terancam kehilangan kesempatan kerja musim panen, dengan munculnya sistim tebasan yang baru itu. Guna lebih membuktikan betapa sentralnya kerja buruh tani itu, Benjamin White menyatakan bahwa pada desa di Jawa tempat dia tinggal, dua pertiga dari rumah-tangga penduduk desa semata-mata tergantung pada pekerjaan di luar pertanian keluarga, hanya sekedar untuk menutup kebutuhan minimal hidup mereka sehari-hari. Dikemukakannya pula bahwa hasil yang diperoleh mereka dari kerja panenan lebih besar dari pada upah yang mereka terima dari kerja lainnya [18]. Penelitian lain yang meliputi delapan desa di Jawa Barat menyebutkan bahwa 35% dari penduduk desanya hidup dari kerja sebagai buruh tani dan sewa tanah [19]. Maka, oleh karena 30 sampai 35 persen dari penduduk desa hidup dari dan tergantung pada pekerjaan sebagai buruh tani *(full-time* ataupun *part-time)*, bisa dibayangkan kemungkinan dahsyatnya akibat sistim tebasan terhadap masyarakat desa. Sekedar memberi gambaran contoh yang agak ekstrim, H. Ten Dam dalam penelitiannya di Desa Cibodas dari tahun 1950 hingga 1954 di suatu daerah yang bukan termasuk penghasil beras yang utama di Jawa Barat, dikemukakan bahwa 44% dari keluarga di desa tersebut sama sekali tidak punya tanah. Sekitar 25% punya tanah yang bisa sekedar dipakai untuk rumah tinggal mereka dan hanya 23% memiliki sebidang kecil tanah yang tidak cukup subur untuk dijadikan sawah atau ladang. Akibatnya, hampir 90% dari seluruh penduduk Desa Cibodas itu harus hidup

16 Herman Soewardi, Staf pengajar, Universitas Pajajaran, Bandung, diskusi pribadi, 20 Oktober, 1973.

17 William L. Collier and Sayogyo, "Villagers' Employment, Sources of Income, Use of High Yielding Varieties and Farm Laborers in the Major Rice Producing Regions of Indonesia", *Research Notes No. 11*, mimeografi, *Survey Agro Ekonomi*, Juni 1972, hal. 8 dan 9.

18 Benjamin White, The Economic Importance of Children in a Javanese Village", (mimeo.) Desember, 1972, hal. 6 dan 7.

19 Herman Soewardi, *Respons Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi Produksi Pertanian Terutama Padi*, thesis Ph. D. Universitas Pajajaran, 1972, hal. 12.

sebagai buruh tani[20]. Tentu saja contoh ini bukan merupakan suatu keadaan yang representatif, namun cukup bisa memberi gambaran mengenai masalah tebasan bila dipraktekkan pada desa-desa yang mayoritas penduduknya adalah buruh tani.

Sebenarnya sukar sekali mengukur pengaruh tebasan terhadap penggunaan tenaga kerja dalam suatu panen padi, karena pemilik sawah tak pernah tahu berapa banyak jumlah orang yang ikut serta mengerjakan panen sawahnya. Bahkan ketika kami sendiri mencoba menghitung, memang sulit memperoleh jumlah orang yang ikut serta dalam suatu panen. Sebab begitu banyak orang yang terus-menerus dan secara bergelombang turun ke sawah sampai panen selesai, dan juga sukar sekali membedakan mana pemotong padi yang sebenarnya, dan mana yang cuma ikut memotong sisa-sisa padi yang tertinggal. Sedangkan penebas bisa lebih tahu tentang jumlah orang yang ikut panen, karena mereka sebagian memilih orang-orangnya dan sebagian mengundang beberapa buruh tani itu. Hanya dengan benar-benar secara teliti sekali menghitung orang yang turun ke sawah, kita bisa memperoleh jumlah angka pemotong padi yang mendekati sesungguhnya. Pada Desa No. 2 penulis menyaksikan dua kali panenan dan menghitung jumlah orang yang ikut serta. Panen yang pertama dilakukan oleh petani pemilik sawah, dan yang kedua oleh penebas. Pada kedua panenan tersebut digunakan alat sabit untuk memotong padi jenis C4. Panen oleh petani, dilakukan di atas sawah seluas 0,24 hektar dengan kira-kira 100 orang ikut serta dalam panen itu, yang berarti 425 orang per hektar. Pada panen sawah yang dilakukan oleh penebas, luas sawahnya 0,54 hektar dan dikerjakan oleh 105 orang yang berarti 194 orang per hektar. Penebas ternyata cukup menggunakan tenaga kerja yang 46% lebih sedikit dibandingkan yang dipakai petani untuk menggarap panen dengan alat sabit yang sama. Perbedaan yang lebih menyolok dilaporkan oleh Utami dan Thalauw di Kabupaten Jepara. Mereka menyaksikan 96 orang pemotong padi bekerja di atas sawah seluas 0,20 hektar, yang berarti 480 orang per hektar. Hanya 50 meter dari tempat itu pada waktu yang sama mereka melihat hanya tiga orang sedang melakukan panen di atas sawah seluas 0,14 hektar, yang berarti 21 orang per hektar. Pada sawah yang pertama panenan itu dilakukan oleh petani, dan pada sawah sebelahnya diawasi oleh penebas[21]. Dalam suatu laporan lain, kedua staf peneliti dari Universitas Satya Warana itu menyatakan bahwa pada dua dari beberapa desa yang mereka survey di Jawa Tengah, permintaan akan tenaga kerja untuk menggarap panen sawah ternyata sangat menurun karena faktor meluasnya sistim tebasan[22]. Bila dibandingkan angka-angka ini dengan laporan yang menyatakan 675 orang per hektar bekerja di sawah-sawah yang relatif luas dan 975 orang yang secara menakjubkan bekerja dengan alat ani-ani pada sawah yang luasnya kurang dari satu hektar, keduanya mengerjakan panen yang digarap petani di Kabupaten Krawang dekat Jakarta, bisa dibayangkan bagaimana akibat tebasan terhadap kesempatan kerja pada musim panen[23].

Bukan hanya tebasan yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja, juga akibat penggantian ani-ani dengan sabit membawa efek yang lebih besar. Menurut perkiraan para penebas yang diinterview, jumlah orang yang bekerja untuk panen mereka dengan alat sabit ternyata 56% lebih kecil daripada jumlah orang yang bekerja menggunakan ani-ani di Desa No. 1, dan 43% lebih kecil di Desa No. 2. Menurut taksiran mereka, pada ke dua desa tersebut rata-rata 179 orang dan 143 orang dari masing-masing desa telah bekerja untuk panen mereka dengan alat ani-ani. Sedangkan banya rata-rata 78 dan 82 orang yang bekerja untuk panen

20 H. Ten Dam, "Cooperation and Social Structure in the Village of Chibodas" dalam *Indonesian Economics. The Concept of Dualism Theory and Practice*, W. van Hoeve Publishers Ltd., The Hague, 1966, hal. 349

21 Widya Utami dan John Thalauw, *Farm Size, Its Consequences on Production, Land Tenure, Marketing and Social Relationship in Kloten Regency*, Central Java, Lembaga Penelitian Ilmu Sosial, Universitas Satya Wacana, 1972, hal. 17.

22 Widya Utami dan John Thalauw, "Tebasan, Suatu Gejala Sosial Ekonomis", *op. cit.*, hal. 36.

23 Rukasah Adiratma, Income of Rice farmers and Their Marketable Surplus of Rice in Karawang District, West Java, tesis Doktor, (tidak diterbitkan) Institut Pertanian Bogor, 1970, hal. 119.

dengan alat sabit. Dalam kedua kesempatan itu para penebas telah melakukan pembatasan jumlah orang yang ikut serta dalam panen. Lebih penting lagi masalah pembatasan jumlah pemotong ini ialah bahwa penebas menggunakan orang-orang yang sama pada setiap panenan yang berarti makin membatasi jumlah buruh tani yang bisa menarik manfaat musim panen. Jika mereka menggunakan orang yang sama, maka lebih besar lagi jumlah penduduk desa yang tidak mungkin memperoleh kesempatan kerja.

Para penebas tidak hanya mampu membatasi jumlah dan memakai tenaga yang sama tetapi juga cenderung mempekerjakan buruh tani dari desanya sendiri untuk menggarap panen mereka di desa-desa lain. Jika penebas membeli panen padi di lain desa, mereka akan membawa tetangga-tetangganya untuk membantu melakukan panen. Bahkan seringkali pemotong padi dari desa-desa lain akan ikut serta dengan penebas yang melakukan panen di desanya sendiri. Jika panen terjadi di desa penebas sendiri, maka suatu rata-rata sebesar 70% dari pemotong padi di Desa No. 1 dan 100% di Desa No. 2 berasal dari desa mereka sendiri. Jika penebas melakukan panen di desa lain, maka di Desa No. 1 penebas akan membawa orang-orang dari desanya sendiri suatu rata-rata sebesar satu setengah dari jumlah orang yang ikut serta panenan. Di Desa No. 2 penebas membawa 100% dari penduduk desanya sendiri untuk menggarap panen di lain-lain desa. Alasan utamanya ialah untuk proteksi. Masyarakat dari desa-desa lain tidak senang dengan para penebas yang membatasi jumlah pemotong padi, mengurangi upah dan menggunakan orang-orang luar untuk menggarap panen di desa mereka. Karena itu, penebas akan merasa lebih aman jika ia mempunyai kawan-kawan dari desanya sendiri untuk menolong dia jika terjadi pertikaian di desa lain[24]. Tentu penebas ini mempunyai alasan-alasan mengapa ia harus membatasi jumlah pemotong padi. Di Desa No. 1, 33% menyebut bahwa pembatasan itu perlu, agar lebih mudah mengontrol hasil panen, dan 33% menyebut supaya hasil panen tidak banyak yang rusak bila hanya sedikit orang yang ikut serta. Sebanyak 67% penebas di Desa No. 2 mengemukakan alasan bahwa mereka harus menurunkan biaya panen. Ada berbagai cara pembatasan yang dilakukan, di antaranya ialah penebas hanya memperkerjakan pemotong-pemotong padi yang sama secara permanen. Cara lain yang digunakan oleh penebas di Desa No. 1 ialah dengan mengatur masa panen sedemikian rupa hingga bersamaan waktunya dengan panen yang dilakukan orang lain. Jelas cara ini dipakai untuk mengurangi jumlah pemotong padi, agar tidak hanya menyerbu satu sawah saja. Di desa-desa sampel di Pemalang, penebas tidak terang-terangan membatasi jumlah pemotong padi, tetapi dengan cara hanya memberi upah yang kecil, mengakibatkan penurunan jumlah buruh tani yang ikut serta dalam panen tebasan.

Agar benar-benar mengurangi jumlah peserta panen, 33% penebas di dua Desa Kabupaten Kendal telah membagikan kertas tanda pengenal (girig) untuk menseleksi orang-orang di desa yang dinyatakan berhak ikut serta dalam panen sawahnya. Para pemotong padi itu akan menaruh tanda pengenalnya di atas topi mereka bila panen mulai, sehingga penebas bisa mengetahui siapa orang-orang yang telah dipilihnya. Kadang-kadang mereka memakai topi merah atau biru untuk menunjukkan kelompok mereka sebagai buruh tani pilihan. Cara seleksi ini benar-benar bisa mengurangi serbuan buruh tani yang ikut serta panen. Di samping itu penebas dengan cara itu juga menciptakan sejumlah besar "klien" atau "anak buah" yang akan menggantungkan nasibnya pada sipenebas. Penebas yang telah menjadi "patron" akan dengan mudah bisa memanggil "klien"nya (buruh tani pemotong padi) untuk berbagai keperluan, paling tidak untuk membela sistim tebasan yang dipakainya. Sebaliknya buruh tani yang telah menjadi klien penebas merasa beruntung karena dengan demikian hanya sedikit saja jumlah orang yang ikut serta pada setiap panenan

[24] Pada beberapa desa sampel lainnya di Jawa, beberapa petani besar mengatakan bahwa salah satu alasan mereka tidak mau menggunakan sabit untuk menggarap panennya ialah karena alat itu terlalu berbahaya. Sabit dapat dipakai sebagai senjata yang bisa mematikan jiwa seseorang.

hingga mereka akan memperoleh bagian panen yang lebih besar dan ada harapan ikut serta dalam beberapa panenan selanjutnya jika mereka berhasil menjadi klien yang aktif dari penebas. Oleh karena ada banyak penduduk desa ini yang bisa menarik keuntungan dari hubungan patron-klien seperti itu, maka mereka tentu menyetujui digunakannya alat sabit dan juga setuju dihapuskannya sistim bawon.

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh penebas terhadap berapa kali buruh tani itu ikut serta dalam panen, telah digunakan suatu test dengan cara *Spearman Rank Correlation* terhadap data-data yang dipakai. Hasilnya menunjukkan suatu korelasi yang positif pada tingkat 1% antara jumlah total berapa kali mereka ikut serta panen desa dan berapa kali mereka ikut serta dalam panen yang digarap penebas di kedua desa tersebut. Dari 30 buruh-buruh pemotong padi yang diinterview di Desa No. 2, 26 di antaranya ikut serta dalam rata-rata 10 panen yang dilakukan penebas, dengan suatu skala antara 1 hingga 33 kali panenan. Dari 41 buruh pemotong padi di Desa No. 1, 40 di antaranya ikut serta dalam rata-rata hampir 23 panen yang dilakukan penebas dengan skala antara 2 hingga 103 kali panenan. Akan tetapi mereka rata-rata ikut serta dengan hanya 2 penebas di Desa No. 2 dan 4 penebas di Desa No. 1 yang berarti adanya indikasi suatu hubungan antara penebas yang menjadi patron dan buruh tani yang menjadi klien penebas. Pada tabel 7 dengan jelas ditunjukkan pentingnya peranan penebas dalam memberi kesempatan panen bagi mereka itu. Di Desa No. 2 kesempatan penebas delapan kali lebih besar dibandingkan dengan petani pemilik sawah, dan di Desa No. 1 kesempatan itu hampir lima kali lebih besar. Penebas di Desa No. 2 ikut serta dalam rata-rata 9,8 kali panen dan mereka yang di Desa No. 1 dengan rata-rata 26,8 panen *(Tabel 7)*.

TABEL 7 Frekwensi buruh pemotong padi yang ikut serta dalam panen yang dilakukan oleh petani dan oleh penebas, musim hujan 1972/1973*.

	Jumlah panenan			*Jumlah pemilik panen*	
	Total	*Petani*	*Penebas*	*Petani*	*Penebas*
Desa No. 2 [a]					
Rata-rata	9,8	1,1	8,7	0,9	1,9
Range	1—18	0—10	0—33	0—5	0—10[b]
Desa No. 1[c]					
Rata-rata	26,8	4,7	22,1	3,0	3,8
Range	4—115	0—50	0—103	0—25	0—15[d]

a Hanya 51% dari buruh yang diwawancarai mengerjakan panenan petani, tetapi 90% mengerjakan panen penebas. Ketika kami mengunjungi Desa No. 2, hanya 30% yang berhasil kami selesaikan.

b Buruh tani yang ikut serta panenan dari 10 penebas yang berlainan melakukan kerjanya itu di luar desanya sendiri untuk penebas yang bukan berasal dari desanya. Angka terbesar berikutnya ialah 4 penebas.

c Hanya 68% dari orang yang diwawancarai mengerjakan panenan petani, tapi 98% mengerjakan panenan penebas.

d Buruh panen yang ikut serta 15 panen penebas, yaitu untuk 7 penebas dari desa itu sendiri dan 8 penebas dari luar desa.

* Data diperoleh dari wawancara terhadap 30 buruh panen di Desa No. 2 dan 41 orang di Desa No. 1 selama musim hujan 1972/73 pada musim panen.

Scott dan Kerkvliet mengungkapkan bahwa bilamana suatu pola ikatan patron-klien secara tradisionil pecah, petani akan mencoba membentuk suatu hubungan baru yang memungkinkan mereka memperoleh sekedar nafkah[25]. Akibat dari sistim tebasan yang terutama disebabkan oleh usaha petani menghilangkan hubungan patron-klien yang tradisionil adalah dengan jalan memaksa buruh tani yang tak punya tanah agar mencari patron yang lain. Dan hanya penebas yang memerlukan bantuan buruh tani yang akan bisa me-

25 J.C. Scott and D. Kerkvliet, "The Erosion of Patron-Client Bounds and Social Change in Rural Southeast Asia", *op. cit.*, hal. 255.

menuhi kebutuhan tersebut. Konsekwensinya, penebas dengan mudah bisa menjadi patron yang baru, akan tetapi karena penebas hanya menggunakan buruh tani yang semi permanen, maka jumlah klien menjadi sangat mengecil. Banyak sekali yang dulunya klien petani ternyata kemudian tidak mampu mencari patron baru dan ini berarti tambahan orang yang memasuki armada penganggur. Sekalipun demikian, mereka yang berhasil memperoleh patron penebas, akan mendapat keuntungan lebih besar dari yang dulunya mereka terima dari patron petani. Dan jika mereka memperoleh untung lebih besar, dengan sendirinya mereka bersedia mendukung dan melindungi penebas dengan lebih hebat.
Dengan adanya sebagian besar kelompok masyarakat, baik penduduk desa yang miskin maupun lurah dan pemimpin-pemimpin desa yang relatif kaya, yang telah menyetujui perubahan pola kebudayaan bertani tersebut, kemungkinan besar mayoritas warga desa juga akan menerima inovasi baru itu. Sebab kalau sesuatu sudah diterima oleh warga desa setempat, hampir mustahil bagi buruh panen yang tersisihkan untuk melakukan protes yang efektif.

Oleh karena siklus bercocok tanam padi sebenarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat desa, maka suatu perubahan dari sistim bawon yang tradisionil menjadi sistim tebasan, pada hakekatnya hal itu menunjukkan suatu perubahan kulturil yang sangat penting di pedesaan. Mungkin, dalam suasana dan lingkungan yang bisa menunjang, daerah pedesaan di Jawa akan mengalami perubahan kulturil yang pesat sekali. Musim panen di daerah-daerah pedesaan sampel umumnya berlangsung selama kira-kira tiga bulan, akan tetapi buruh panenan mempunyai kesempatan bekerja panen hanya untuk waktu kira-kira 25 hari (Tabel 8).

TABEL 8 Daerah operasi, dan jumlah hari yang dipakai buruh tani untuk menggarap panen pada desa-desa sampel di Kabupaten Kendal, musim hujan panenan 1972/73*.

Keterangan	*Desa No. 1*	*Desa No. 2*
1. Jumlah observasi	41	30
2. Persentase buruh panen dari desa yang bersangkutan (%)	71,0	100,0
3. Jumlah desa di mana mereka ikut kerja panen	2,9	2,7
4. Rata-rata jarak desa-desa tersebut dari rumah mereka (Km).	(1–7) 2,8	(1–6) 3,5
5. Rata-rata jumlah hari mereka bekerja panenan	25	27[a]
6. Persentase buruh panen yang merasa mendapat kesempatan yang cukup untuk ikut panen (%)	36,6	16,7

a Angka ini sudah disesuaikan, karena pada waktu wawancara dilakukan di Desa No. 2 hanya 30% dari panen yang telah selesai. Karena itu, rata-ratanya yaitu 8 hari sudah dibagi dengan 30%.
* Data-data ini berdasarkan hasil wawancara dengan buruh panenan.

Seringkali terjadi bahwa buruh panenan tidak memperoleh kesempatan bekerja, dan bila demikian keadaannya, mereka biasanya akan mengumpulkan sisa-sisa padi di sawah yang baru saja panen. Hanya 36,7% dari buruh panen yang diwawancarai di Desa No. 1 mengatakan bahwa mereka telah memperoleh kesempatan yang cukup untuk ikut serta panen. Di Desa No. 2 hanya 16,7% dari mereka yang merasa mendapat cukup kesempatan *(Tabel 8)*. Di Desa No. 1, daerah operasi para buruh panenan meliputi 1 sampai 7 desa dan secara rata-rata mereka bekerja di 2,9 desa. Di Desa No. 2 daerah operasi itu meliputi 1 sampai 6 desa dan rata-rata bekerja di 2,7 desa *(Tabel 8)*.
Sampai dengan musim kering 1972, usaha penebas untuk membatasi jumlah buruh panenan dengan cara girig (memberikan tanda pengenal) masih mungkin dilakukan. Tetapi pada

musim hujan 1972/1973, penebas mengalami tantangan dalam menggunakan girig. Rupanya sesudah membagi-bagikan girig, penebas masih sulit membatasi ikut sertanya para pemotong padi panenan itu, karena mereka yang tidak memperoleh girig ternyata tetap memaksa dengan caranya sendiri untuk ikut serta panen. Jelas tidak mudah mencegah mereka itu. Salah seorang pembantu penebas mencoba melarang mereka yang tak punya girig ikut serta panen tebasan, tetapi dia segera diserang oleh buruh wanita yang ada di sawah. Pembantu penebas itu akhirnya harus dirawat selama tiga hari di rumah sakit setempat. Sejak kejadian itu, tampaknya tidak mungkin lagi membatasi jumlah buruh panen tebasan dengan menggunakan girig. Akan tetapi ketika kami kembali lagi pada bulan Oktober 1973 ke desa tersebut, dan berbicara dengan pembantu penebas itu enam bulan sesudah peristiwa penyerangan di atas, ternyata dia telah berhasil menguasai keadaan dan mempraktekkan kembali pembatasan jumlah pemotong padi dengan menggunakan girig.

Barangkali kemampuan daya serap *(absorptive capacity)* dari sawah-sawah para petani di Jawa yang setiap kali harus mempekerjakan tambahan satu orang untuk menggarapnya, dewasa ini telah mencapai batas kejenuhannya. Apabila para petani tidak mau lagi menghormati kewajiban sosialnya yang tradisionil, maka suatu proses involusi pertanian desa *(agricultural involution)* akan mencapai titik batas akhirnya. Seperti dikatakan oleh Clifford Geertz:

> "Wet rice cultivation, with its extraordinary ability to maintain levels of marginal labor productivity by always managing to work one more man without a serious fall in per capita income, soaked up almost the whole of the additional population that Western intrusion created, at least indirectly. It is this ultimately self-defeating process that I have proposed to call "agricultural involution"[26].

Jika sekali telah terjadi involusi pertanian desa, maka sistim tebasan yang sekarang telah banyak dipraktekkan oleh para petani dan pedagang desa paling tidak untuk beberapa daerah tidak saja akan mencegah proses involusi lebih lanjut, tapi juga akan mengurangi kegawatan pertanian sawah di Jawa yang mudah sangat kritis dewasa ini.

Pendapatan Petani

Sebagian besar para petani pada empat desa sampel, menjual panen padinya kepada penebas pada musim hujan 1972/1973 dan musim kering 1972. Seperti telah diuraikan di atas, ada berbagai alasan mengapa mereka melakukan penjualan itu, namun alasan yang utama adalah untuk meningkatkan pendapatan yang bisa mereka peroleh dari hasil produksi sawahnya dengan jalan tidak menggarap sendiri panen sawahnya itu. Petani akan memperoleh pendapatan 20% per hektar lebih besar dengan menjual panen padi jenis IR kepada penebas daripada hila harus menggarap dan menjualnya sendiri. Jika petani menjual panen padi jenis C4 kepada penebas, maka pendapatan yang diterimanya naik dengan 17% per hektar dibandingkan bila ia menjualnya langsung ke pedagang. Perkiraan ini berdasarkan keterangan pada Tabel 9 yang memberikan angka-angka tentang hasil sawah, harga padi, biaya panen, dan penghasilan dari penjualan cara tebasan dan non-tebasan. Dalam tabel tersebut jumlah padi yang dihasilkan sebidang sawah dianggap sama baik untuk padi jenis IR atau C4, dengan cara tebasan ataupun non-tebasan, agar supaya pendapatan petani bisa diperbandingkan. Hanya ada satu masalah di sini bahwa padi jenis IR dalam tabel ini harganya sama saja apakah dibeli penebas dari petani ataupun petani menjual langsung hasil panennya sendiri. Bagaimanapun, keterangan dari hasil wawancara itu memang menunjukkan hal sebenarnya.

Untuk lebih menjelaskan soal kenaikan pendapatan petani tadi, salah seorang dari petani sampel yang progresif dj Desa No. 1 yang ternyata juga seorang penebas tapi harus menjual

26 Clifford Geertz, *Agricultural Involution*, University of California Press, 1968, hal 80.

TABEL 9 Perbandingan penghasilan petani dari panen padi bibit unggul, tebasan dan non-tebasan, musim hujan 1972/73, Kabupaten Kendal*.

	Tebasan		*Non-tebasan*	
	IR	*C4*	*IR*	*C4*
1. Jumlah hasil panen padi (metrik ton/Ha)[a]	4,1	3,7	4,1	3,7
2. Harga padi (Rp/kg)[b]	33,0[c]	34,0[d]	33,0[e]	35,0[f]
3. Nilai panen padi (Rp/Ha)	135,300	125,800	135,300	129,500
4. Panen padi per Unit	–	–	16,7%[g]	16,7%[g]
5. Biaya panen (Rp/Ha)	–	–	22,595	21,627
6. Pendapatan yang diperoleh petani:				
a. Rp/Ha	135,300	125,800	112,705	107,873
b. $/Ha	326,-	303,-	272,-	260,-

a Perkiraan hasil panen padi jenis IR diperoleh berdasarkan wawancara dengan 9 petani dan 4 penebas di Desa No. 1. Perkiraan hasil C4-68 diperoleh dari wawancara dengan 3 penebas di Desa No. 1, 3 penebas di Desa No. 2, dan 3 petani di Desa No. 2. Hasil padi tebasan dan non-tebasan digabung untuk memudahkan membuat perbandingan pendapatan petani. Pengertian hasil panen padi di sini ialah dalam bentuk gabah kering.

b Harga-harga di sini adalah dalam rupiah per kg gabah kering panen.

c Harga padi jenis IR ini merupakan jumlah uang yang dibayar oleh penebas kepada petani. Perkiraan ini berdasarkan wawancara dengan 4 penebas dan 5 petani di Desa No. 1.

d Harga padi jenis C4 ini adalah jumlah yang dibayarkan penebas kepada petani. Perkiraan ini berdasarkan wawancara dengan 5 penebas di Desa No. 1, 3 penebas di Desa No. 2, dan 3 petani di Desa No. 2.

e Harga padi jenis IR ini merupakan jumlah uang yang diterima petani dari hasil penjualan sendiri pada Maret 1973 dalam bentuk gabah kering panen.

g Jika petani ditanya berapa banyak bagian hasil panen yang diberikan kepada buruh panen, umumnya mereka menyebut angka 10%. Tetapi dalam wawancara dengan petani yang lebih progresif dan lurah desa, mereka mengatakan jumlah sebenarnya adalah 16,7% karena desakan buruh-panen yang mau menaikkan bagian hasil yang mereka terima.

* Data dari wawancara dengan petani dan penebas di dua desa Kabupaten Kendal, Maret 1973.

hasil panennya sendiri kepada fihak lain, telah membuat perhitungan bahwa kalau sebagai petani ia harus mengawasi sendiri panen sawahnya maka ia menderita kerugian sampai 25% lebih, karena besarnya jumlah orang yang ikut serta dalam panen. Maka biasanya petani tadi menjual 75% dari panen padi dengan cara tebasan, dan 25% mengawasi sendiri panennya dengan cara bawon, hingga dengan begitu dia bisa mencegah kemarahan buruh panen yang biasa memperoleh bawon dari petani tersebut. Dikemukakannya bahwa petani-petani kecil yang hanya punya sawah seluas 0,8 hektar akan terpaksa menjual seluruh panen padinya dengan cara tebasan, tetapi petani yang sawahnya lebih luas akan mengawasi sendiri kira-kira 25% dari panen sawahnya dengan cara bawon, agar supaya peranannya sebagai petani yang harus melakukan fungsi sosial di desanya tetap terpenuhi.

Utami dan Ihalauw dalam hal ini mengemukakan kasus yang juga menegaskan keuntungan yang diperoleh petani bila panen padinya dijual kepada penebas. Di Kabupaten Jepara mereka melihat bahwa kalau seorang petani menggarap sendiri sawahnya, dia hanya menerima 57,7% dari jumlah hasil panen karena adanya berbagai kewajiban sosial dan kerugian yang diderítanya. Penghasilan si petani dari penjualan hasil panen berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu hanyalah sebesar $ 20,35 untuk sawah seluas 0,16 hektar. Jika petani tersebut menjual panen sawahnya kepada penebas, ia bisa menerima pendapatan sampai sejumlah $ 33,75 atau kenaikan pendapatan sebesar 66% bisa dinikmatinya [27].

Beberapa alasan lain mengapa petani menjual kepada penebas juga diuraikan oleh Utami dan Ihalauw. Menurut pengamatan mereka, kalau petani harus mengurus penjualan hasil

27 Widya Utami dan John Ihalauw, "Some Consequenses of Small Farm Size", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, July, 1973, hal. 54.

panennya sendiri, hal ini berarti petani itu sendiri yang harus memproses gabah padi yang masih basah agar menjadi padi kering, suatu hal yang selalu mengandung risiko penurunan harga jika menurut penilaian fihak penggiling padi tersebut dianggap tidak cukup kering. Akan tetapi dengan menjual kepada penebas, petani akan terhindar dari masalah proses pengeringan padi tersebut. Bukan hanya itu, petani juga terhindar dari risiko penurunan harga, kesulitan pemasaran, pengangkutan dan penyimpanan gudang[28]. Dengan dialihkannya urusan pemasaran kepada penebas, berarti penebas mempunyai kedudukan *(bargaining position)* yang lebih kuat dalam menghadapi pembeli padi yang besar sekali jumlahnya di kota karena berbagai alasan. Umumnya penebas menjual padi dalam jumlah yang cukup besar dan mereka juga cukup menguasai keadaan pasaran harga di mana-mana. Posisi penebas lebih kuat juga karena bisa menunggu dan menahan penjualan sampai seminggu, dua minggu, atau mungkin lebih lama lagi. Bahkan penebas mampu menggunakan truk yang memudahkan pengangkutan padi sampai pada pembeli dengan tawaran paling tinggi, sekalipun tempatnya jauh di kota besar. Petani kecil sama sekali tidak memiliki fasilitas dan hal-hal tersebut di atas, hingga posisi mereka menjadi sangat lemah.

Petani sampel menjual kepada penebas karena mereka butuh uang tunai dan sangat ingin mendapat untung yang lebih besar. Hampir dua per tiga dari petani yang ditanya menjawab bahwa mereka sangat butuh uang tunai dan seperriga lagi mengatakan ingin laba lebih besar. Uang yang mereka peroleh digunakan terutama untuk membayar hutang, dan juga berbagai kehutuhan lain. Dibutuhkannya uang tunai untuk membayar kembali pinjaman-pinjaman itu, untuk sebagian disebabkan oleh penggunaan bibit unggul yang memerlukan pupuk dan insektisida. Sebagian besar petani ikut serta dalam program BIMAS pemerintah dan mereka hampir selalu membayar kembali kredit pinjaman BIMAS itu segera setelah panen.

Kesimpulan

Dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang bisa diduga ketegangan-ketegangan sosial di kalangan masyarakat pedesaan di Jawa akan sangat meningkat. Hal ini disebabkan oleh makin meningkatnya buruh tani yang tak punya tanah dan makin besarnya jumlah petani-penggarap dengan sebidang tanah kecil yang tidak cukup memperoleh kesempatan kerja untuk sekedar bisa menyambung hidup esok hari. Salah satu faktor yang sedang dan akan mempengaruhi timbulnya ketegangan itu ialah sistim tebasan padi yang rupanya makin populer di kalangan petani, pedagang dan pemimpin desa. Mereka itu berhasil meningkatkan penghasilan mereka dengan menggunakan cara tebasan, tapi hal itu dicapai dengan jalan menurunkan biaya-biaya panen padi yang tradisionil, dan mengurangi kesempatan kerja bagi sebagian besar buruh tani di desa. Sekalipun belum bisa dibuktikan secara pasti, tampaknya ada suatu hubungan antara meluasnya penggunaan bibit padi unggul dengan meluasnya tebasan.

Munculnya tebasan hanyalah merupakan salah satu indikasi bahwa sebenarnya mitos kepercayaan orang Jawa tentang kemampuan sawah yang selalu sanggup menampung pertambahan penduduk, ternyata tidak sepenuhnya benar. Jelas sekali bahwa tebasan adalah suatu upaya dari mereka yang memiliki sawah untuk mengurangi proses pemiskinan usaha tani sawah di Jawa. Usaha-usaba lain di berbagai daerah di Jawa sedang dilakukan oleh petani sawah untuk mengurangi biaya-biaya mereka dan untuk mencegah terlalu berlimpahnya buruh tani di desa, yang akan dibahas lebih lanjut pada lain kesempatan.

Dengan makin meluasnya praktek tebasan, perubahan hubungan patron-klien antara klien-buruh yang dulunya erat berhubungan dengan patron-petani akan makin banyak diganti-

28 *Ibid.*

kan oleh patron-penebas. Namun tidak semua buruh tani itu bisa berharap akan memperoleh patron-penebas, karena penebas selalu berusaha menekan jumlah buruh panen yang ikut panen sawahnya. Akibatnya hal ini akan menimbulkan semacam pembagian sosial di kalangan buruh-tani itu sendiri, yaitu antara mereka yang punya patron dan yang tidak. Dalam setiap pertikaian mengenai tebasan, si penebas akan bisa memanggil buruh-kliennya agar membela kedudukannya di desa tersebut. Perpecahan di antara kedua kelompok buruh tani tersebut mungkin tak bisa dielakkan, karena penebas selalu mencoba mengeksploitir persaingan di antara kedua kelompok itu demi kepentingannya. Oleh karena itu kelak tidak hanya akan terjadi ketegangan sosial di antara penebas, petani dan pemuka desa di satu fihak dengan buruh-tani panenan di lain fihak, bahkan juga ketegangan di antara kelompok-kelompok buruh tani itu sendiri, yang tambah melemahkan lagi posisi mereka.

Digunakannya jenis padi bibit unggul belum membantu memecahkan persoalan kesempatan kerja dan pembagian pendapatan masyarakat di Jawa. Justru masalah-masalah tersebut makin rumit karena adanya bibit unggul. Karena di daerah-daerah tertentu di Jawa munculnya pemakaian bibit unggul telah di barengi dengan timbulnya praktek tebasan dan pemakaian alat sabit untuk panen, di mana kedua hal itu makin mengurangi kesempatan kerja dan menaikkan pendapatan petani, penebas serta hanya sejumlah kecil kelompok buruh panenan.

Apabila pembangunan pertanian diartikan sebagai ditingkatkannya penghasilan petani dari hasil investasinya di desa, maka tebasan memang menunjang pembangunan. Akan tetapi jika pembangunan pertanian diartikan sebagai perbaikan taraf hidup dan stabilitas sosial yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan, maka tebasan menunjukkan akibat sebaliknya.

Dalam hal ini suatu langkah tindakan pemerintah untuk mengbentikan atau mengurangi meluasnya sistim tebasan - dengan surat keputusan ataupun melalui berbagai instansi - akan merupakan tindakan yang keliru. Suatu metode lain harus dicari untuk menyediakan kesempatan kerja di pedesaan bagi para buruh tani agar supaya petani pemilik sawah di Jawa dapat terus meningkatkan pendapatannya dari hasil panen padi bibit unggul. Suatu kemungkinan untuk memperluas kesempatan kerja adalah dengan meningkatkan tingkat intensitas dalam pertanian dengan usaha menanam tanaman sela *(intercropping)* dan juga melipat gandakan panenan per tahun per tanaman[29]. Di pedesaan sampel Kabupaten Kendal, banyak petani yang mampu melakukan tiga kali panen padi dalam jangka 15 bulan. Lainnya menanam padi dua kali dan tanaman sela sekali dalam setahun. Tetapi dua desa sampel tersebut memang merupakan kasus yang agak unik, karena mempunyai fasilitas irigasi yang baik dan terus mengalir sepanjang tahun. Untuk membantu memecahkan masalah kesempatan kerja, salah satu langkah yang bermanfaat ialah dengan usaha perbaikan saluran irigasi sekunder atau tertier. Karena di mana saja penduduk desa kalau ditanya apa kebutuhan mereka yang paling mendesak, mereka selalu pertama kali akan menyebut perlunya perbaikan saluran irigasi di desa dan sawahnya.

Agaknya ada kemungkinan meningkatkan kesempatan kerja di bidang industri untuk kota-kota besar di Jawa. Akan tetapi hanya sedikit sekali, kalaupun ada, bukti-bukti yang kuat bahwa para penganggur di daerah pedesaan dapat diserap oleh kesempatan kerja di kota-kota besar, paling tidak dalam suatu skala yang ada pengaruhnya pada tingkat pertanian desa.

Kemungkinan mengembangkan industri pedesaan untuk membantu memecahkan pengangguran di desa, barangkali mempunyai prospek lebih baik. Pada salah satu desa sampel di Jawa Timur, terdapat lebih dari dua puluh bengkel-bengkel kecil yang memproduksi sabit,

29 Achmad T. Birowo, "Aspek Kesempatan Kerja dalam Pembangunan Pertanian di Pedesaan", *Prisma*, Agustus 1973, hal. 15.

pacul, sekop dan lain-lain peralatan pertanian yang sederhana. Desa-desa lain ada yang melakukan industri kerajinan tangan, seperti di salah satu desa sampel mereka membuat alat-alat gamelan dan boneka-boneka wayang dan sebagainya.

Sepanjang pantai utara pulau Jawa, prospek timbulnya "revolusi biru" nampaknya amat menarik. Suatu jenis teknologi telah dipraktekkan untuk mengembangkan produksi ikan dan udang secara besar-besaran dalam tambak-tambak yang dikerjakan secara padat karya. Masalah yang akan dihadapi tambak-tambak ikan itu adalah bagaimana mencegah terjadinya pencemaran insektisida dari sawah-sawah sekitarnya. *Program* apapun yang dapat *membantu memperbaiki* usaha tambak-tambak perikanan tersebut pasti akan meningkatkan kesempatan kerja.

